

Profesionalisme Guru Pada Era Otonomi Daerah

Sholatul Hayati

Program Stud Pendidikan Anak Usia Dini
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Khairiyah Cilegon
Jalan H. Enggus Arja No. 1 Link. Citangkil Cilegon 42443

Abstrak

Pendidikan adalah investasi kemanusiaan jangka panjang. Persoalan pendidikan yang menyangkut perangkat keras, yakni sarana dan prasarana proses pembelajaran, serta perangkat lunaknya (tenaga kependidikan atau guru) perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Namun demikian tampaknya banyak penentu kebijakan di negeri ini belum menyadari pentingnya meningkatkan alokasi anggaran pendidikan secara memadai. Kualitas sumber daya manusia bisa ditingkatkan apabila berbagai lembaga pendidikan yang ada, dari pendidikan SD, SLP, SLA hingga perguruan tinggi juga berkualitas. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan adalah dengan cara meningkatkan kompetensi para guru secara memadai sehingga para guru menjadi pendidik-pendidik yang profesional. Dengan demikian, ada hubungan kausalitas atau sebab akibat antara peningkatan kualitas para guru (profesional) dengan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam kenyataannya, dunia pendidikan di Indonesia tidak hanya dituntut untuk menciptakan sumber daya manusia yang bisa memenuhi kebutuhan pelaksanaan program otonomi daerah. Akan tetapi yang tidak kalah penting adalah untuk melahirkan SDM-SDM yang kelak bisa bersaing atau berbicara dalam era globalisasi ekonomi di saat diberlakukannya perdagangan bebas dunia (WTO) maupun perdagangan bebas tingkat Asean.

Kata Kunci: *Guru, Profesionalisme, Otonomi Daerah*

Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa mulai tahun 2001 ini pemerintah pusat menginstruksikan program otonomi daerah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesiaa, baik pemda di tingkat I maupun II. Program otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Dengan otonomi daerah maka Pemda Tk I dan II diberi kewenangan mengatur berbagai kebutuhan daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan bentuk perwujudan dari perubahan kewenangan pemerintah pusat yang semula bersifat sentralistik sejak era Orde Baru menuju desentralisasi dalam berbagai bidang. Kebijakan demikian harus diterima setiap penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah, sehingga setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada.

Sampai saat ini persiapan berbagai daerah dalam melaksanakan otonomi daerah tampak lebih tertuju pada bagaimana memperoleh pemasukan uang sebesar-besarnya untuk kas daerah. Misalnya, hal ini ditempuh dengan peningkatan besaran pajak PBB, kendaraan bermotor, retribusi berbagai sektor, eksploitasi sumber daya alam tanpa batas dsb. Akibatnya, banyak warga masyarakat yang semula membayangkan otonomi daerah sebagai salah satu jalan meningkatkan kesejahteraan rakyat justru menjadi “jalan” kesengsaraan rakyat. Kecenderungan semacam ini kalau dibiarkan terus-menerus akan sangat berbahaya sebab bisa membiaskan tujuan otonomi daerah yang sebenarnya, yakni usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Dalam konteks ini, seharusnya perolehan pemasukan uang dari berbagai sumber itu harus dipergunakan untuk urusan-urusan pelayanan publik seperti pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan. Berkaitan dengan diimplementasikannya otonomi daerah, termasuk di dalamnya otonomi pendidikan, sudah barang tentu lembaga-lembaga pendidikan di daerah harus berusaha meningkatkan kualitasnya. Lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, dan budaya memiliki posisi yang cukup penting dan strategis (Eko Budihardjo, 2001).

Kebanyakan pemerintah daerah (tingkat I dan II) tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup handal untuk mengelola daerahnya secara optimal. Untuk itu, kerja sama yang lebih erat antara lembaga pendidikan di daerah dengan pemerintah daerah setempat sangat diperlukan. Hanya saja kesiapan daerah untuk melaksanakan otonomi pendidikan sebenarnya masih perlu dipertanyakan. Menurut pakar pendidikan Suyanto - yang juga rektor Universitas negeri Yogyakarta (Kompas, 16-5-2001)—disebutkan bahwa bukan mustahil kesiapan tersebut tampaknya masih sebatas pada tahapan kesiapan psikologis. Sementara itu, kesiapan teknis dan profesionalnya masih diragukan. Misalnya, apakah setiap sekolah di daerah telah siap melaksanakan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS), sebab untuk melaksanakan hal ini ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, terutama menyangkut sumber daya manusia, lingkungan sekolah dan masyarakat.

Dalam rangka mengisi format otonomi daerah yang berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat banyak itulah maka peningkatan kualitas pendidikan diperlukan. Salah satu cara yang bisa ditempuh dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan adalah dengan cara meningkatkan profesionalisme para guru.

Masalah Profesionalisme Guru

Dalam konteks ini, guru merupakan ujung tombak dari peningkatan kualitas pendidikan. Hanya saja harus didasari bahwa berbicara masalah kualitas kompetensi dan kualitas kerjanya tidak bisa dilepaskan dari tingkat kesejahteraan guru. Sampai saat ini berbagai keluhan tentang rendahnya pendapatan para guru menjadi salah satu faktor penentu rendahnya kualitas para pendidik. Bisa demikian karena di luar jam kerjanya ada di antara para guru masih harus mencari nafkah tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya ketersediaan waktu untuk meningkatkan kompetensinya menjadi berkurang. Dibandingkan dengan sesama negara ASEAN maka tingkat kualitas dan kesejahteraan guru kita tergolong paling memprihatinkan. Kondisi demikian bukan saja telah lama diketahui pemerintah, tetapi juga masyarakat luas.

Pakar pendidikan Winarno Surachmat (Kompas, 16-5-2001) mengatakan bahwa kondisi tenaga pendidikan (guru) di daerah-daerah masih menyedihkan. Hal ini

bukan saja menyangkut masalah penghasilan, tetapi juga moral dan komitmennya untuk terjun dalam dunia pendidikan pun tidak utuh atau kurang sungguh-sungguh. Maksudnya, ketika menjadi guru orang tidak didorong oleh semangat yang benar, tetapi hanya sekedar agar tidak menganggur. Malahan Suyanto menambahkan bahwa 40-50 % guru yang ada sekarang ini tidak sesuai dengan bidang keahliannya (Kompas, 16-5-2001). Mendiknas Yahya Muhaimin mengakui bahwa bahwa kualifikasi guru di tingkat SD, SLP, dan SLA masih sangat rendah. Mengingat guru menjadi kunci utama dalam peningkatan utama mutu pendidikan nasional, maka kondisi guru yang memprihatinkan itu harus segera diperbaiki (Kompas, 29-1-2001).

Situasi yang demikian jelas sangat menyedihkan mengingat Indonesia sedang mengejar peningkatan mutu pendidikan. Fakta demikian menjadi diperparah lagi dengan adanya isu putera asli daerah yang diperbolehkan mengajar di daerah-daerah tertentu. Padahal sebagaimana diketahui bahwa guru seharusnya bersifat lintas lokasi, lintas, etnis, dan lintas agama.

Memang upaya peningkatan kompetensi profesional guru telah dilakukan melalui berbagai kegiatan pendidikan, dan pelatihan seperti penataran, program penyetaraan, dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Tidak bisa ditolak dengan adanya kenyataan bahwa program penyetaraan dan pendidikan jenjang yang lebih tinggi merupakan program yang paling menarik minat para guru. Hanya saja program seperti ini memerlukan biaya yang mahal. Sedangkan program penataran lebih bersifat insidental, dan hasilnya pun bersifat relatif.

Berbagai fakta yang ada menunjukkan bahwa tidak sedikit kegiatan program penataran yang 'gagal' karena biaya penyelenggaraannya lebih besar dari output yang diperoleh (Djoko S. Passandaran, 2001). Bisa jadi programnya memang bagus, tetapi mungkin karena penyelenggaraannya cenderung tidak profesional, maka proyek tersebut kurang berpengaruh terhadap kinerja guru.

Pendidikan adalah investasi kemanusiaan jangka panjang. Persoalan pendidikan yang menyangkut perangkat keras, yakni sarana dan prasarana proses pembelajaran, serta perangkat lunaknya (tenaga kependidikan atau guru) perlu mendapatkan perhatian dari

pemerintah. Namun demikian tampaknya banyak penentu kebijakan di negeri ini belum menyadari pentingnya meningkatkan alokasi anggaran pendidikan secara memadai.

Peran sebagai pengajar atau instruktur

Dalam hal ini, guru harus menyampaikan sejumlah materi pelajaran sesuai dengan GBPP yang berupa informasi, fakta serta tugas ketrampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Dalam perannya sebagai pengajar, maka seorang guru harus melakukan beberapa hal berikut ini: Menyusun program pengajaran selama kurun waktu tertentu secara berkelanjutan, Membuat persiapan mengajar atau rencana kegiatan belajar mengajar, Menyiapkan alat peraga yang diperlukan, Menyiapkan alat evaluasi belajar, Mengatur ruangan kelas, Mengatur tempat duduk siswa sesuai dengan kemampuan dan kondisi fisik siswa.

Peran guru sebagai pendidik

Maksudnya ialah harus berusaha mengantarkan siswanya agar menjadi manusia dewasa yang cerdas dan berbudi luhur dengan dititikberatkan pada pembentukan sikap/perilaku watak dan mental. Selain mengajar, seorang guru berperan sebagai pendidik. Karena itu perlu keteladanan dari guru. Guru seolah-olah menjadi orang kedua di sekolah bagi para siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, seorang guru harus memiliki lima kompetensi atau kemampuan dasar yang antara lain mencakup hal-hal di bawah ini.

Menguasai kurikulum GBPP. Maksudnya, guru harus mengetahui batas-batas materi yang harus disajikan dalam kegiatan belajar mengajar, baik keluasan materi, konsep maupun tingkat kesulitannya sesuai dengan yang digariskan dalam kurikulum. Mengatahui materi pelajaran. Menguasai metode dan evaluasi belajar. Memiliki komitmen atau setia terhadap tugasnya, yakni dengan kata lain seorang guru harus mencintai dan setia terhadap tugasnya. Displin, yaitu guru selain melatih sikap disiplin pada anak didiknya, juga harus mampu mendisiplinkan dirinya.

Apabila seorang guru dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik telah melaksanakan kelima kompetensi di atas berarti ia telah menempuh jalan menuju sikap yang profesional. Kebutuhan guru yang profesional sangat mendesak. Hal ini berdasarkan fakta sebagaimana dinyatakan Mendiknas Yahya Muhaimin bahwa secara administratif pada seluruh tingkatan jenjang pendidikan dari SD hingga SLA masih

rendah (Kompas, 29-1-2001). Lebih jauh dinyatakan Yahya Muhaimin bahwa berdasarkan aturan pemerintah sebenarnya hampir 70% guru SD tidak layak mengajar, sebab mereka belum mengambil program penyetaraan pendidikan yang minimal D-2. Keberadaan guru-guru yang profesional memiliki arti yang signifikan bagi pengembangan suatu daerah dalam rangka otonomi daerah seperti saat ini. Bisa demikian karena dengan hadirnya para guru yang profesional kelak akan dilahirkan sejumlah SDM yang berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas maka dengan sendirinya daerah bisa memenuhi berbagai kebutuhan tenaga ahli yang siap mengembangkan pembangunan di daerah sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Karena itu, profesionalisme para guru bukan saja berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Namun lebih jauh hal itu akan berpengaruh terhadap pelayanan kesejahteraan masyarakat setempat.

Tantangan Otonomi Daerah dalam Era Globalisasi

Pada saat ini, dunia pendidikan di Indonesia sedang menghadapi dua tantangan besar yang tidak mudah dihadapi. Pada satu sisi, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka otonomi dalam bidang pendidikan mau tidak mau harus juga dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia, kebudayaan, dan alam di daerah setempat. Pada pihak lain, para pengelola pendidikan di negeri ini harus menghadapi tantangan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap bersaing dalam era percaturan global.

Kedua masalah ini sekarang sama-sama meghantui dunia pendidikan di tanah air. Berdasarkan penelitian Human Development Index (HDI) pada tahun 2000 disebutkan bahwa dari penelitian terhadap kualitas sumber daya manusia di 134 negara, maka Indonesia menduduki peringkat ke-109 (Ali Khomsan, 2000. Sementara itu, peringkat kualitas SDM negara-negara Asean lain seperti Vietnam peringkat ke-103, malaysia ke-53, Thailand ke-52, Brunei ke-36, dan Singapura ke-34.

Berdasarkan peringkat tersebut kelihatan bahwa kualitas SDM kita jauh di bawah negara-negara Asean, kecuali dari Vietnam. Dalam kondisi kualitas SDM yang demikian maka akan sulit bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi persaingan

lapangan pekerjaan dalam era perdagangan bebas Asean maupun dunia (World Trade Organization). Kondisi rendahnya kualitas SDM ini kalau tidak segera diatasi, maka di masa mendatang jabatan-jabatan penting atau profesi-profesi bergengsi di berbagai bidang pekerjaan akan diduduki oleh tenaga kerja asing. Pada kondisi demikian generasi muda Indonesia hanya menjadi penonton dari sepak terjang para pekerja luar negeri yang bekerja di sini.

Memang membangun sektor pendidikan tidak akan pernah selesai dan tuntas sepanjang peradaban manusia itu masih ada. Ketika sebuah persoalan yang muncul selesai ditangani, bukan mustahil akan muncul persoalan baru yang lain. Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kodrat perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah-ubah pula. Untuk itu, agar bangsa ini memiliki peran yang penting dalam kehidupan umat manusia, baik yang terjadi dalam skala lokal, nasional, regional, maupun global, maka sistem pendidikan yang ada harus mampu memberdayakan masyarakat secara luas (Suyanto, 2001). Dalam hal ini, salah satu ciri masyarakat yang diberdayakan oleh sistem pendidikan adalah dimilikinya unggulan komparatif dalam konteks global. Artinya, masyarakat kita memiliki keunggulan tertentu yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Kesimpulan

Berdasarkan sejumlah uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka mensukseskan program otonomi daerah, maka daerah-daerah perlu menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Kualitas sumber daya manusia bisa ditingkatkan apabila berbagai lembaga pendidikan yang ada, dari pendidikan SD, SLP, SLA hingga perguruan tinggi juga berkualitas. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan adalah dengan cara meningkatkan kompetensi para guru secara memadai sehingga para guru menjadi pendidik-pendidik yang profesional. Dengan demikian, ada hubungan kausalitas atau sebab akibat antara peningkatan kualitas para guru (profesional) dengan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam kenyataannya, dunia pendidikan di Indonesia tidak hanya dituntut untuk menciptakan sumber daya manusia yang bisa memenuhi kebutuhan pelaksanaan program otonomi daerah. Akan tetapi yang tidak kalah penting adalah untuk melahirkan SDM-SDM yang kelak bisa bersaing atau berbicara dalam era globalisasi ekonomi di saat diberlakukannya perdagangan bebas dunia (WTO) maupun perdagangan bebas tingkat Asean.

Daftar Pustaka

- Ali Khomsan. 2000. *Peringkat SDM Kita*. Kompas:Jakarta.
- Djoko S. Passandaran. 2011. *Pendidikan Kita Menghadapi Otonomi Daerah* "Kedaulatan Rakyat. Yogyakarta.
- Eko Budiardjo. 2001. *Pendidikan Berbasis Potensi Lokal*. Kompas:Jakarta.
- Kompas, "Mutu Guru Terus Ditingkatkan", 29-1-2001, Jakarta.
- Kompas, "Disentralisasi Bisa Turunkan Mutu Pendidkan", 16-5-2001, Jakarta
- Suyanto, "Tantangan Pendidikan Hadapi Globalisasi, Kompas, 16-5-2001, Jakarta.
- Umar Hadi, "Pengelolaan Kelas", Makalah tanpa tahun, tanpa keterangan.